

Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Sumatera Utara

¹Lailan Nur, ²Intan Sari Tanjung, ³Muhammad Rivaldi Pane, ⁴Rahmat Hidayat,
⁵Sari Ulandari

^{1,2,3,4}Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan

⁵Manejemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara AlWashliyah

Email : lailann240@gmail.com, intansaritanjung15@gmail.com, mpanel64@gmail.com,
rhmt98092@gmail.com, sariwulandari@umnaw.ac.id

Corresponding Mail Author : lailann240@gmail.com

Abstract : Poverty is a completely limited situation that occurs not at the will of the person concerned. A population is said to be poor if it is marked by a low level of education, productivity employment, income, health and nutrition as well as welfare, which shows a circle of powerlessness. The most lagging province in Sumatra is North Sumatra. According to the Central Statistics Agency, there will be 1,356,720 poor people in North Sumatra in 2020. In terms of poverty, North Sumatra ranks fourth out of 34 Indonesian provinces according to the Central Statistics Agency in 2020, after East Java, West Java and Central Java, as can be seen in the chart below. By using qualitative research techniques, the main data used in this research is converted into secondary data from various sources. Direct Cash Assistance (BLT), NonCash Food Assistance (Bpnt), and Social Assistance are all based on Law no. Project 5 was implemented by the Regional Government of Medan City in 2015. These include housing assistance and a Business School.

Keywords: Medan City, Poverty.

I. Pendahuluan

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Sumatera Utara adalah provinsi Sumatera yang paling parah atau tertinggal. Di Sumatera Utara, pada tahun 2020 akan ada 1.356.720 orang miskin, menurut Badan Pusat Statistik. Selain itu, grafik di bawah ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara, dari 34 provinsi di Indonesia, menempati urutan keempat dalam proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan, di bawah provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik, 2020). Hasil ini memperjelas bahwa perjuangan melawan kemiskinan perlu dimajukan sejauh mungkin. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, terpadu, dan menyeluruh, serta memperhatikan berbagai elemen kehidupan masyarakat. Tingkat dan tingkat keparahan kemiskinan di provinsi ini perlu diperhitungkan.

Untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan rumah tangga miskin, pemerintah Sumatera Utara terus meningkatkan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Menurut Todaro (2015), terdapat hubungan antara tingkat upah yang rendah karena kemelatan, variasi upah antar jaringan, dan pembangunan di bidang kesejahteraan umum dan persekolahan yang miskin dan tidak ideal. Untuk memperjelasnya, kita perlu mengatasi akar penyebab kemiskinan. Dengan meningkatkan investasi dan produk nasional bruto, serta dengan memaksimalkan peningkatan pendidikan dan fasilitas kesehatan, kemiskinan dapat dikurangi.

Tabel 1. Data Penduduk Miskin

Kabupaten kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota(000) (Jiwa)		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Nias	22.10	23.12	24.33
Mandailing Natal	40.64	41.31	43.24
Tapanuli Selatan	24.22	23.96	25.01
Tapanuli Tengah	46.99	47.19	49.95
Tapanuli Utara	28.57	28.41	29.72
Toba Samosir	15.78	16.05	16.61
Labuhan Batu	41.52	42.17	45.03
Asahan	70.53	66.32	69.29
Simalungun	76.33	73.64	76.99
Dairi	21.86	22.93	23.72
Karo	34.08	36.57	38.01
Deli Serdang	84.94	86.26	92.52
Langkat	103.08	101.87	106.59
Nias Selatan	52.51	53.88	55.16
Humbang Hasundutan	16.60	17.92	18.71
Pakpak Bharat	4.52	4.59	4.79
Samosir	15.79	15.80	16.08
Serdang Bedagai	48.69	49.18	51.16
Batu bara	50.46	49.78	52.59
Padang Lawas Utara	26.06	26.79	28.37
Padang Lawas	23.17	23.87	25.78
Labuhanbatu Selatan	30.17	28.63	30.36
Labuanbatu Utara	34.76	34.86	37.13
Nias Utara	34.42	34.74	35.84
Nias Barat	22.08	22.33	21.75
Sibolga	10.82	10.49	10.80
Tanjungbalai	24.54	23.54	24.10
Pematangsiantar	21.99	21.23	22.06
Tebing Tinggi	16.30	16.32	17.37
Medan	183.79	183.54	193.03

Binjai	15.61	15.91	16.46
Padangsidempuan	16.06	16.56	17.28
Gunungsitoli	23.06	23.54	24.02
Sumatera Utara	1282.04	1283.29	24.33

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatera Utara

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat.

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Pengertian kemiskinan

Badan pusat statistik BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar—baik kebutuhan pangan maupun nonpangan—pada standar minimum. Sebaliknya, Cahyat (2004) UNDP mendefinisikan kemiskinan sebagai ketimpangan untuk memperluas pilihan hidup termasuk mengidentifikasi non partisipasi dalam perumusan kebijakan publik sebagai indikator kemiskinan..

Kemiskinan (*integrative concept*) memiliki lima (5) dimensi yaitu:

1. Kesulitan (*proper*)
2. kelemahan (*powerless*)
3. Kerentanan dalam menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)
4. Ketergantungan (*dependence*)
5. Keterasingan (*isolation*) baik itu secara geografis maupun sosiologis.

Menurut Rejkningsih (2011), kemiskinan adalah suatu jenis kondisi yang menekankan pada pemeliharaan standar hidup minimum, terutama dalam hal konsumsi dan pendapatan. Selain itu, kemiskinan merupakan masalah multisektoral, multiregional, dan multigenerasi yang memerlukan penanganan terpadu, berkelanjutan, dan pendapatan inklusif harus dibenahi. Sulit untuk menilai kualitas hidup seseorang karena kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka akan barang.

Penyebab Kemiskinan

Berikut ini beberapa sumber kemiskinan menurut Nasikun, yaitu:

1. *Policy induces processes*, (Politik memprovokasi proses) yang merupakan suatu proses kemiskinan abadi yang diciptakan oleh penerapan kebijakan yang mencakup, tetapi sebenarnya mempertahankan, kebijakan antikemiskinan.
2. *Socio economic dualism*, (Dualisme sosial ekonomi) yang merupakan, negaranegara bekas jajahan terkena kemiskinan akibat pola produksi colonial.
3. *Population growth*, (Pertumbuhan populasi). Perspektif berdasarkan teori Malthus bahwa pertumbuhan populasi menyerupai deret geometri, sedangkan pertumbuhan makanan menyerupai deret aritmetika.

4. *Recources management and the environment*, (pengelolaan sumberdaya dan lingkungan). Lingkungan hidup memiliki unsure kesalahan pengelolaan sumberdaya alam.
5. *Natural sycles and processes*, Kemiskinan muncul melalui siklus dan proses alam, seperti hidup di lahan kritis.

Selain itu, salah satu contohnya adalah "Penyebab kemiskinan menurut Hartomoand Aziz dalam Dadan Hudyana" (2009:2829) sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan yang relative rendah: Seseorang dengan tingkat pendidikan yang relative rendah mungkin tidak memiliki keterampilan hidup tertentu. Peluang untuk memasuki dunia kerja mungkin terbatas jika Anda tidak berpendidikan.
2. Malas bekerja karena sikap malas dapat membuat orang apatis atau acuh tak acuh terhadap pekerjaannya dan kurang motivasi.
3. Sumberdayaalamyangterbatas, Orang akan menjadi lebih miskin ketika sumber daya alam ini tidak lagi berfungsi sebagai sarana penghidupan karena ketersediaannya yang terbatas.
4. Lapangan pekerjaan yang terbatas, Kemiskinan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan karena tidak banyak kesempatan kerja. Orang miskin tidak mungkin mampu menciptakan lapangan kerja baru karena mereka kekurangan sumber daya dan keahlian untuk melakukannya.
5. Modal terbatas, kekurangan modal, orang miskin mungkin tidak dapat memperoleh alat dan bahan yang diperlukan atau mempelajari keterampilan baru untuk menghasilkan pendapatan.

Selain itu, menurut Suryadiningrat, ketidakmampuan manusia untuk berpegang pada norma, kebenaran, kejujuran, dan keadilan bagi umat beragama menjadi penyebab utama kemiskinan. Hal inilah yang merugikan individu dan mempengaruhi orang lain.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, dimana data sekunder dari penelitian terdahulu atau sumber lain diolah dari data primer dalam penelitian kualitatif. Tempat penelitian ini berlokasi di kota Medan, provinsi Sumatera Utara, ini bertujuan untuk memperjelas peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data dari buku, penelitian sebelumnya, internet, dan sumber lain, serta data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), digunakan dalam metode pengumpulan data penelitian ini.

III. Hasil Dan Pembahasan

Ketentuan Pasal 14 No. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Medan untuk mengentaskan kemiskinan pada tahun 2015 dituangkan dalam 1 Peraturan Daerah Kota Medan: sebagai berikut:

1. Bantuan pangan

Bantuan pangan yang telah di salurkan oleh Pemerintah setempat adalah:

1. BANSOS (Bantuan sosial)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bantuan sosial adalah penyaluran bantuan kepada masyarakat secara sporadis dan selektif baik berupa

uang maupun barang. Pemerintah memberikan 20 kilogram bijibijian, 2 kilogram gula, dan 1 liter air sebagai bantuan kesejahteraan.

2. BLT (Bantuan langsung tunai)

Pemerintah menawarkan bantuan tunai kepada masyarakat miskin melalui program bantuan tunai. BLT mendapatkan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. Sejak pandemi Covid19, 300.000 orang datang setiap bulan. Bagi mereka yang membutuhkan yang tidak mendapatkan PKH atau BPNT, BLT bisa menjadi pilihan.

3. BPNT (Bantuan pangan non tunai)

Setiap bulan, pemerintah memberikan bantuan sembako nontunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui rekening elektronik yang mereka gunakan untuk membeli kebutuhan pokok dari eWarong KUBE PKH (warung gotong royong elektronik). DanBank Mandiri, HIMBARA, BTN, BNI, dan BRI. dengan Rp. total dana. Donatur program BPNT dapat menukarkan 200.000 Rupiah dengan 15 kg beras, satu butir telur, dan satu ekor ayam.

2. Bantuan kesehatan

PKH kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang tersedia. Tujuan dari program PKH adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka gizi buruk pada balita. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, No.PUSTU (Puskesmas Pembantu) merupakan satusatunya jaringan penyedia layanan kesehatan di Nelayan Indah yang mengikuti pedoman yang dituangkan dalam 903/Menkes/Per/V/2011 tentang penyelenggaraan skema jaminan kesehatan masyarakat. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan salah satu komponen peserta PKH di bidang kesehatan, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. bayi, ibu hamil, lansia, dan anak berkebutuhan khusus.

3. Bantuan pendidikan

PKH juga memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat untuk membantu membesarkan anakanak kita. Bantuan Pendidikan PKH diberikan setiap tiga bulan sekali melalui PKH Pendidikan, dan sektor pendidikan meningkatkan akses anak terhadap sumber daya pendidikan. Tingkat pendidikan anak menentukan pendanaan.

4. Bantuan perumahan

Kompleks perumahan masyarakat tetap kumuh. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai dan sekitar rel kereta api. Dengan latar belakang tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman merenovasi rumah untuk membantu masyarakat miskin yang masih mengungsi.

5. Bantuan peningkatan dan keterampilan

Keterampilan adalah program pendidikan yang dirancang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar guna membantu mereka tumbuh secara intelektual. Menjahit adalah kemajuan teknologi yang diterima masyarakat di Medan, Indonesia, dari pemerintah. adalah bentuk pendidikan yang masyarakat menerima dari pemerintah untuk memperoleh sumber keuangan yang mereka butuhkan untuk bekerja mencari nafkah.

6. Bantuan modal usaha

Kota Nelayan Indah, Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dijalankan oleh UMKM dengan aset senilai Rp. 2.400.000, diberikan uang oleh pemerintah (Rp. Dua juta empat ratus ribu).

7. Bantuan Keamanan

Untuk melindungi masyarakat, pemerintah membentuk masyarakat hukum dan ketertiban yang dikenal sebagai Kamtibmas. Namun, pemerintah gagal menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 5 perda kota medan tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan, yang antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan sasaran program yang tidak tepat
2. Masyarakat yang tidak terlalu aktif
3. Masyarakat menggunakan bantuan secara konsumtif

Berikut merupakan peranan pemerintah daerah:

1. Pemerintah daerah dapat memilih untuk berinvestasi di perusahaan publik dan swasta. Penyertaan modal dapat ditingkatkan, dikurangi, dialihkan, atau dijual kepada bisnis lokal. Peraturan daerah yang meniru undangundang dan peraturan mengatur pendirian, penggabungan, pengalihan kepemilikan, dan pembubaran BUMD, dan lokal pemerintah dapat memiliki BUMD.
2. Untuk mendanai kebutuhan khusus, pemerintah daerah dapat membangun cadangan sumber daya yang tidak dapat mereka sediakan sepanjang tahun. Peraturan pemerintah menetapkan pedoman untuk cadangan lokal.
3. Pemerintah daerah wajib menyampaikan pospos surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Keuangan setiap enam bulan selama tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan usulan revisi perda beserta justifikasi dan dokumen pendukungnya ke APBD.
4. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membentuk badan yang terencana dan terintegrasi untuk mengelola pembangunan pedesaan. Ketika pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, mereka memberi mereka lebih banyak kekuatan.

Selain itu, dalam kerangka desentralisasi, praktik cogovernment, dan desentralisasi, peran pemerintah daerah yang diharapkan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom adalah:

1. Desentralisasi.

Dalam tatanan negara kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi juga sering disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu persetujuan semua kekuasaan yang semula ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi kekuasaan pemerintahan daerah yang menjalankan pemerintahan untuk mengendalikan dan mengawasi pemerintahan. usaha.metode desentralisasi politik di mana individu dan saluran perwakilan pemerintah tertentu berfungsi dalam batasbatas wilayah mereka.

2. Dekonsentrasi.

Dekonsentrasi, atau melaksanakan dan menunjang tugas dengan melimpahkan wewenang dari pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah atau kepada

pejabat vertikal di daerah tertentu. Misalnya melaksanakan segala tugas dari pemerintahan kepada kabupaten dan desa, pemerintahan negara bagian kepada prefektur atau kota atau desa, dan prefektur atau kota atau desa kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Mustopadidjaja (2003) menegaskan bahwa tiga pengaruh utama pada pemerintahan adalah struktur pemerintahan, birokrasi, dan prosedur administrasi. Instansi pemerintah perlu disosialisasikan dan diberi wewenang lebih untuk memastikan bahwa struktur organisasi dan prosedur administrasi memenuhi persyaratan. dan persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Medan yang dituangkan dalam Pasal 14 Ayat 5 Perda Kota Medan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. BANSOS (Bantuan Sosial), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah bentuk bantuan sembako.
2. Bantuan kesehatan
3. Bantuan pendidikan
4. Bantuan perumahan
5. Bantuan peningkatan dan keterampilan
6. Bantuan untuk modal usaha
7. Bantuan keamanan masyarakat

Saran

Pemerintah kota Medan di Sumatera Utara harus lebih memperhatikan masalah kemiskinan untuk lebih mengurangi angka kemiskinan. Diharapkan juga bahwa program-program masyarakat ke depan akan diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

V. Daftar Pustaka

- Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, JMPK, Vol.8, No.03,
Dumasari, *Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1,
No.11
Elvira Handayani, dkk. *Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.19, No.3,
<https://sumut.bps.go.id>
Itang Fauzi, *FaktorFaktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan, Vol.16, No.1,
Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.
Putri Amalia Harefa (2022) *Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan*. Jurnal Eltalib,

Samuka, *Faktorfaktor Yang Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Utara*, Dalam Jurnal Samudra Ekonomika, Vol.5 No.2 2021
Yulianto Kadji, 2012, *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*, UNG Repository, Vol.1 No.7.